



rancangan awal

# RENCANA KERJA

Perangkat Daerah

**PROVINSI  
KALIMANTAN  
SELATAN**

Tahun

# 2025

**DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- k. Peraturan Gubernur Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
- l. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- n. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
- o. Peraturan Gubernur Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

- p. Peraturan Gubernur Nomor 015 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023**

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **BAB V. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2023. yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp.13.52 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Target A (88.50) Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13.52 Trilyun Rupiah	13.72 Trilyun Rupiah	101.48%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.50)	A (94.25)	106.50%

Data Triwulan III 2023, Sumber :DPMPTSP, Data diolah

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun, untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan dengan rincian 1 Program Non-Urusan yang terdiri dari 7 Kegiatan serta 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah (Urusan

Penanaman Modal dan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Nonperizinan) yang terdiri dari 6 Kegiatan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (rutin perkantoran dan kesekretariatan)**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sebesar 85.72% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00% yaitu tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ/LPPD dan Laporan Tahunan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Akuntansi
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya pakaian dinas Frontoffice

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
  - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan fisik) 100,00%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100.00% dengan sub. Kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (fisik) 100.00%
  - Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
  - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

## **II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sebesar 90.39% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
  - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (fisik) 100,00%

### **III Program Promosi Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sebesar 92.51% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%

#### **IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sebesar 91.88% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

#### **V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sebesar 67,09% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 73.13%, dengan sub.kegiatan:
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

## **VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 93.81% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

2. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
  - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Mengenai :**

#### **Isu Strategis Organisasi**

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
  - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
  - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
  - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
  - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. sarana dan prasarana belum optimal;
11. sistem informasi pelayanan belum optimal;
12. Keterbatasan Anggaran.

**Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong**

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya promosi investasi</li> <li>- Belum teridentifikasinya data potensi daerah</li> <li>- Ketidakmerataan penanaman modal</li> <li>- Pelayanan belum optimal</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM.</li> <li>- Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota</li> <li>- Sinkronisasi Perencanaan</li> <li>- Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan</li> <li>- Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan</li> <li>- Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan</li> <li>- Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi</li> <li>- Kesiapan kelembagaan penanaman modal</li> <li>- Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen</li> </ul>

**Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Beirisikan Uraian Mengenai**



Print Excel

### Laporan Konsolidasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2023

Kode SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000  
 Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Realisasi				Satu an unit
		Sub Output	Satuan Unit		Fisik	Keu	S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.087.756.472	99,99	84,7	13.087.756.472	11.085.228.322	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			552.438.600	100	86,73	552.438.600	479.088.670	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	310.054.100	100	86,73	310.054.100	268.898.670	3 Dokumen
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	242.384.500	100	86,72	242.384.500	210.190.000	3 Dokumen
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.071.814.492	100	81,55	8.071.814.492	6.582.396.675	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.832.548.692	100	82,21	7.832.548.692	6.439.159.275	14 Bulan

X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	226.981.300	100	57,83	226.981.300	131.252.400	1 Dokumen
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	12.284.500	100	97,56	12.284.500	11.985.000	1 Dokumen
X.XX.01.1.05	AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah			110.808.000	100	77,78	110.808.000	86.195.100	
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Unit	9.000.000	100	100	9.000.000	9.000.000	6 Unit
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	56.644.000	100	82,56	56.644.000	46.767.300	20 Orang
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	204 Orang	18.520.000	100	76,4	18.520.000	14.150.000	204 Orang
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	26.644.000	100	61,09	26.644.000	16.277.800	23 Orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.564.197.700	100	87,06	1.564.197.700	1.361.822.700	

X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	24.390.100	100	94,3	24.390.100	22.999.000	12 Paket
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	97.775.000	100	94,97	97.775.000	92.859.900	12 Bulan
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 Buah	454.365.600	100	92,13	454.365.600	418.600.000	24 Buah
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.170.000	100	96,23	60.170.000	57.902.000	12 Paket
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	139.512.000	100	99,92	139.512.000	139.405.800	1 Dokumen
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	787.985.000	100	79,96	787.985.000	630.056.000	40 Laporan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			611.800.000	99,86	94,34	611.800.000	577.125.000	
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	554.770.000	100	94,06	554.770.000	521.800.000	3 Unit
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	850,000	0	0	850,000	0	0 Paket

X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Paket	56.180.000	100	98,48	56.180.000	55.325.000	5 Paket
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.080.117.600	100	84,84	1.080.117.600	916.359.519	
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	11.735.000	100	85,21	11.735.000	9.999.500	12 Laporan
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	538.000.000	100	80,27	538.000.000	431.857.019	12 Laporan
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	530.382.600	100	89,46	530.382.600	474.503.000	12 Laporan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.096.580.080	100	98,69	1.096.580.080	1.082.240.658	
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	502.522.000	100	99,82	502.522.000	501.628.086	24 Unit
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	469.098.080	100	97,51	469.098.080	457.423.572	4 Unit

X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 Unit	124.960.000	100	98,58	124.960.000	123.189.000	7 Unit
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			738.260.200	100	90,39	738.260.200	667.274.500	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			300.211.700	100	82,73	300.211.700	248.368.400	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	224.050.500	100	83,2	224.050.500	186.407.400	1 Dokumen
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	1 Dokumen	76.161.200	100	81,36	76.161.200	61.961.000	1 Dokumen
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			438.048.500	100	95,63	438.048.500	418.906.100	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	16.135.600	100	87,3	16.135.600	14.085.800	1 Dokumen

2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah PeJumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsiraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	421.912.900	100	95,95	421.912.900	404.820.300	1 Dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.365.464.800	100	92,51	1.365.464.800	1.263.247.350	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.365.464.800	100	92,51	1.365.464.800	1.263.247.350	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	818.098.000	100	95,02	818.098.000	777.369.400	1 Dokumen
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	547.366.800	100	88,77	547.366.800	485.877.950	1 Dokumen
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.194.497.200	100	91,88	1.194.497.200	1.097.453.240	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.194.497.200	100	91,88	1.194.497.200	1.097.453.240	

2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	550.628.200	100	97,34	550.628.200	535.962.600	6 Pelaku Usaha
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	18.366.000	100	91,17	18.366.000	16.744.000	6 Pelaku Usaha
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan	80 Orang	79.778.500	100	91,16	79.778.500	72.726.300	80 Orang
<b>Total</b>				17.972.248.072	100	85,72	17.972.248.072	15.406.278.342	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi							

2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	545.724.500	100	86,49	545.724.500	472.020.340	6 Pelaku Usaha
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			942.598.400	100	73,13	942.598.400	689.275.820	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			942.598.400	100	73,13	942.598.400	689.275.820	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda	1 kegiatan	82.187.700	100	85,63	82.187.700	70.379.250	1 kegiatan
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 Pelaku Usaha	593.254.300	100	72,19	593.254.300	428.258.120	1 Pelaku Usaha

2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	1 kegiatan	267.156.400	100	71,36	267.156.400	190.638.450	1 kegiatan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	1 Dokumen
<b>Total</b>				<b>17.972.248.072</b>	<b>100</b>	<b>85,72</b>	<b>17.972.248.072</b>	<b>15.406.278.342</b>	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
<p><b>Kondisi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi</li> <li>2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi</li> <li>3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan</li> <li>4. Pelaksanaan pelyanan publik terkait perizinan dan non prizinan</li> <li>5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.</li> </ol> <p><b>Isu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya investasi di Kalsel</li> <li>2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan</li> </ol>	<p><b>Tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>✓ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</li> </ul> <p><b>Sasaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan Investasi yang Berdampak ke Daerah</li> <li>✓ Meningkatkan Pelayanan Publik</li> </ul> <p><b>Strategi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>✓ Peningkatan Promosi Penanaman Modal</li> <li>✓ Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>✓ Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pemberian Fasilitas di Bidang Penanaman Modal</li> <li>2. Pembuatan Peta Promosi Investasi</li> <li>3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</li> <li>4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal</li> <li>6. Pengelolaan, Penyajian data dan informasi Perizinan secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>::</li> <li>a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</li> <li>b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</li> </ul> </li> <li>2. Program Promosi Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi</li> </ul> </li> <li>3. Program Pelayanan Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</li> </ul> </li> <li>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</li> </ul> </li> </ol>

### 3.2 Tujuan sasaran

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

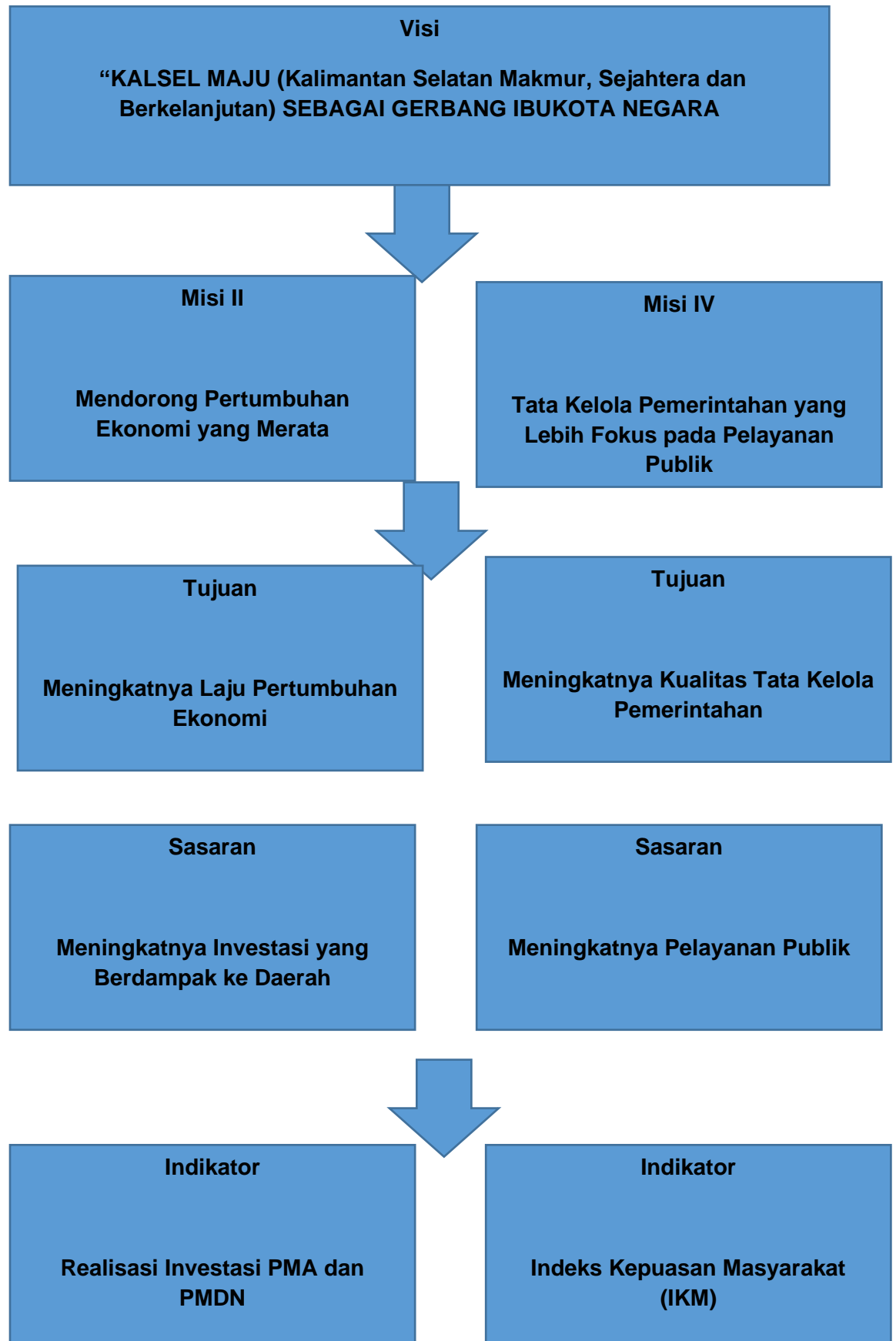
1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
  - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
  - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
  - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
  - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2026, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara kinerja utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 14.55 Trilyun
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“A” 89

### **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

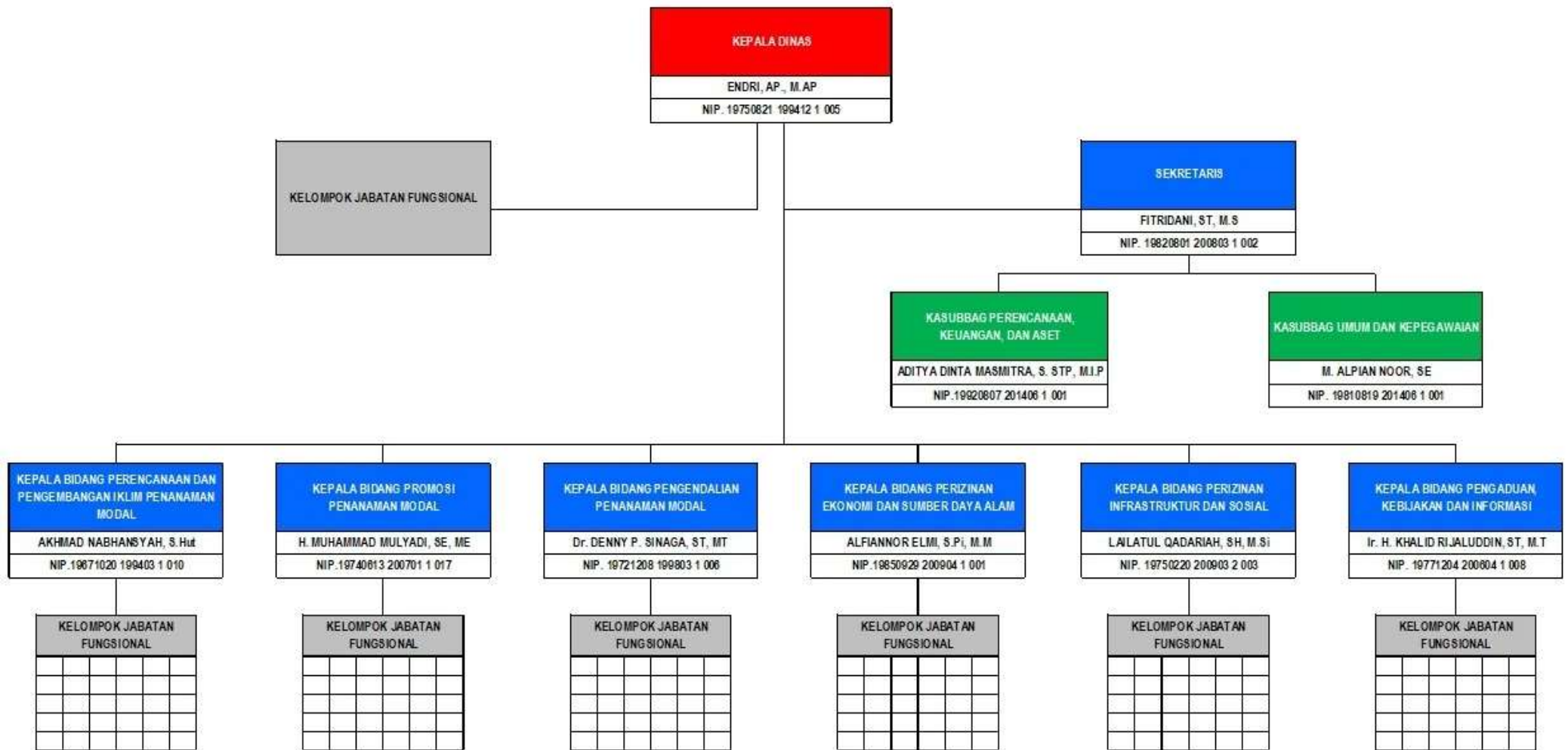
1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

### **3.2.1. Susunan Kepegawaian**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosia**
- 8. Bidang Kebijakan, Hukum dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.**



### 3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
- g. pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan, dan informasi; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;

- g. mengoordinasikan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Kelompok Sub Bagian**

#### **a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas PMPTSP;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas PMPTSP;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Bidang Promosi Penanaman Modal**

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program promosi pananaman modal daerah;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program promosi penanaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal**

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kearsipan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penelitian;

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi.**

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2025 yakni : “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” dengan 25 Prioritas pembangunan daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal, dengan menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin / kesekretariatan dan 5 (lima) program urusan penanaman modal/nonrutin, yakni:

#### Rutin Kesekretariatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### Non Rutin/ Urusan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Provinsi
2. Pembuatan peta Potensi Investasi Provinsi

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4. Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan daerah Provinsi
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
6. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
7. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
8. Administrasi Keuangan
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 terlampir sebagai bahan usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelimpahan kewenangan Penanaman Modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah memerlukan persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tahapan-tahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga perlu Penyusunan Perencanaan yang matang untuk pencapaian target kinerja sesuai SKPD.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru,

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Selatan,

**Endri, Ap, M.AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750821199412 1 005

## LAMPIRAN



Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tidak Ada

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab																
							I		II		III		IV		K		Rp (Ribu)		K (%)		Rp (%)		K		Rp (Ribu)		K			Rp (Ribu)															
							K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)														
1							204	Orang	18.520.000	75	Orang	11.450.000	75	Orang	11.450.000	135	Orang	11.450.000	204	Orang	14.150.000	204	Orang	14.150.000	100	76.4	204	Orang	14.150.000	100	76.4														
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan																																										
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				23	Orang	26.644.000	0	Orang	0	0	Orang	0	4	Orang	600.000	23	Orang	16.277.800	23	Orang	16.277.800	100	61.09	23	Orang	16.277.800	100	61.09														
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													100	80.01																															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													ST	T																															
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100	Point	1.564.197.700	25	Point	264.262.300	50	Point	557.755.400	75	Point	867.826.700	100	Point	1.361.822.700	100	Point	1.361.822.700	100	87.06	100	Point	1.361.822.700	100	87.06														
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12	Paket	24.390.100	3	Paket	14.734.000	6	Paket	14.734.000	9	Paket	22.999.000	12	Paket	22.999.000	12	Paket	22.999.000	100	94.3	12	Paket	22.999.000	100	94.3														
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12	Bulan	97.775.000	3	Bulan	43.986.300	6	Bulan	43.986.300	9	Bulan	74.432.400	12	Bulan	92.859.900	12	Bulan	92.859.900	100	94.97	12	Bulan	92.859.900	100	94.97														
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				24	Buah	454.365.600	12	Buah	68.040.000	20	Buah	169.480.000	22	Buah	270.900.000	24	Buah	418.600.000	24	Buah	418.600.000	100	92.13	24	Buah	418.600.000	100	92.13														
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12	Paket	60.170.000	3	Paket	23.703.500	6	Paket	23.703.500	9	Paket	39.383.500	12	Paket	57.902.000	12	Paket	57.902.000	100	96.23	12	Paket	57.902.000	100	96.23														
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1	Dokumen	139.512.000	0	Dokumen	31.034.300	0	Dokumen	62.068.600	0	Dokumen	100.737.200	1	Dokumen	139.405.800	1	Dokumen	139.405.800	100	99.92	1	Dokumen	139.405.800	100	99.92														
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40	Laporan	787.985.000	6	Laporan	82.764.200	32	Laporan	243.783.000	33	Laporan	359.374.600	40	Laporan	630.056.000	40	Laporan	630.056.000	100	79.96	40	Laporan	630.056.000	100	79.96														
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													100	92.92																															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													ST	ST																															
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100	Point	611.800.000	25	Point	0	50	Point	0	75	Point	0	100	Point	577.125.000	100	Point	577.125.000	100	94.33	100	Point	577.125.000	100	94.33														
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3	Unit	554.770.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	3	Unit	521.800.000	3	Unit	521.800.000	100	94.06	3	Unit	521.800.000	100	94.06														
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan				1	Paket	850.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0	Paket	0	0	0														
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5	Paket	56.180.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	5	Paket	55.325.000	5	Paket	55.325.000	100	98.48	5	Paket	55.325.000	100	98.48														
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													66.67	64.18																															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													S	R																															
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan				100	Point	1.080.117.600	25	Point	222.197.229	50	Point	432.345.882	75	Point	663.650.578	100	Point	916.359.519	100	Point	916.359.519	100	84.84	100	Point	916.359.519	100	84.84														

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada																																																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tidak Ada																																																			
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab																							
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																				
		Pemerintahan Daerah	Kesekretariatan																																																
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12	Laporan	11.735.000	3	Laporan	4.999.500	6	Laporan	4.999.500	9	Laporan	7.499.500	12	Laporan	9.999.500	12	Laporan	9.999.500	100	85.21	12	Laporan	9.999.500	100	85.21																					
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	Laporan	538.000.000	3	Laporan	114.356.229	6	Laporan	221.747.082	9	Laporan	330.430.178	12	Laporan	431.857.019	12	Laporan	431.857.019	100	80.27	12	Laporan	431.857.019	100	80.27																					
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	Laporan	530.382.600	3	Laporan	102.841.500	6	Laporan	205.599.300	9	Laporan	325.720.900	12	Laporan	474.503.000	12	Laporan	474.503.000	100	89.46	12	Laporan	474.503.000	100	89.46																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						100	84.98																												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						ST	T																												
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100	Point	1.096.580.080	25	Point	117.402.616	50	Point	365.519.716	75	Point	630.089.273	100	Point	1.082.240.658	100	Point	1.082.240.658	100	98.69	100	Point	1.082.240.658	100	98.69																					
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			24	Unit	502.522.000	15	Unit	93.168.316	20	Unit	193.699.616	23	Unit	333.839.573	24	Unit	501.628.086	24	Unit	501.628.086	100	99.82	24	Unit	501.628.086	100	99.82																					
		X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4	Unit	469.098.080	0	Unit	24.234.300	0	Unit	133.855.100	3	Unit	222.923.700	4	Unit	457.423.572	4	Unit	457.423.572	100	97.51	4	Unit	457.423.572	100	97.51																					
		X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			7	Unit	124.960.000	0	Unit	0	4	Unit	37.965.000	5	Unit	73.326.000	7	Unit	123.189.000	7	Unit	123.189.000	100	98.58	7	Unit	123.189.000	100	98.58																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						100	98.64																												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						ST	ST																												
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																						100	87.28																												
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T																												
		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan			100	Persen	738.260.200	0	Persen	41.919.900	0	Persen	109.257.600	0	Persen	134.039.600	100	Persen	667.274.500	100	Persen	667.274.500	100	90.38	100	Persen	667.274.500	100	90.38																					
		2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kemitraan dunia usaha			3	Kemitraan	300.211.700	0	Kemitraan	15.685.000	0	Kemitraan	62.037.500	2	Kemitraan	62.037.500	3	Kemitraan	248.368.400	3	Kemitraan	248.368.400	100	82.73	3	Kemitraan	248.368.400	100	82.73																					
		2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1	Dokumen	224.050.500	0	Dokumen	0	0	Dokumen	38.246.500	0	Dokumen	38.246.500	1	Dokumen	186.407.400	1	Dokumen	186.407.400	100	83.2	1	Dokumen	186.407.400	100	83.2																					
		2.18.02.1.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku			1	Dokumen	76.161.200	0	Dokumen	15.685.000	0	Dokumen	23.791.000	0	Dokumen	23.791.000	1	Dokumen	61.961.000	1	Dokumen	61.961.000	100	81.36	1	Dokumen	61.961.000	100	81.36																					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada																															
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tidak Ada																															
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab							
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
		Facilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah																												
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													100	82.28																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													ST	T																	
		2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan sektor investasi				100	Persen	438.048.500	0	Persen	26.234.900	0	Persen	47.220.100	100	Persen	72.002.100	100	Persen	418.906.100	100	Persen	418.906.100	100	95.63	100	Persen	418.906.100	100	95.63
		2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1	Dokumen	16.135.600	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	14.085.800	1	Dokumen	14.085.800	1	Dokumen	14.085.800	100	87.3	1	Dokumen	14.085.800	100	87.3
		2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah PeJumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsiraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1	Dokumen	421.912.900	0	Dokumen	26.234.900	0	Dokumen	47.220.100	0	Dokumen	57.916.300	1	Dokumen	404.820.300	1	Dokumen	404.820.300	100	95.95	1	Dokumen	404.820.300	100	95.95
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													100	91.63																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													ST	ST																	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													100	89.18																	
Predikat Kinerja Kegiatan													ST	T																	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Investasi dipromosikan				30	Persen	1.365.464.800	0	Persen	208.541.200	0	Persen	284.273.550	0	Persen	409.472.950	30	Persen	1.263.247.350	30	Persen	1.263.247.350	100	92.51	30	Persen	1.263.247.350	100	92.51
		2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan promosi investasi				5	Kali	1.365.464.800	1	Kali	208.541.200	0	Kali	284.273.550	4	Kali	409.472.950	5	Kali	1.263.247.350	5	Kali	1.263.247.350	100	92.51	5	Kali	1.263.247.350	100	92.51
		2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi penanaman modal Provinsi				1	Dokumen	818.098.000	0	Dokumen	40.378.100	0	Dokumen	69.065.500	0	Dokumen	86.546.700	1	Dokumen	777.369.400	1	Dokumen	777.369.400	100	95.02	1	Dokumen	777.369.400	100	95.02
		2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi				1	Dokumen	547.366.800	0	Dokumen	168.163.100	0	Dokumen	215.208.050	0	Dokumen	322.926.250	1	Dokumen	485.877.950	1	Dokumen	485.877.950	100	88.77	1	Dokumen	485.877.950	100	88.77
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													100	91.9																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													ST	ST																	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													100	92.51																	
Predikat Kinerja Kegiatan													ST	ST																	
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan				88.5	Nilai	1.194.497.200	0	Nilai	254.726.840	0	Nilai	532.164.240	97.5	Nilai	783.231.540	97.5	Nilai	1.097.453.240	97.5	Nilai	1.097.453.240	110.17	91.88	97.5	Nilai	1.097.453.240	110.17	91.88

		2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan						88.5	Nilai	1.194.497.200	0	Nilai	254.726.840	0	Nilai	532.164.240	93	Nilai	783.231.540	93	Nilai	1.097.453.240	93	Nilai	1.097.453.240	105.08	91.88	93	Nilai	1.097.453.240	105.08	91.88
--	--	---	--	--	--	--	--	--	------	-------	---------------	---	-------	-------------	---	-------	-------------	----	-------	-------------	----	-------	---------------	----	-------	---------------	--------	-------	----	-------	---------------	--------	-------

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tidak Ada

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab																		
				K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																												
		2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi				6	Pelaku Usaha	550.628.200	0	Pelaku Usaha	135.508.600	4	Pelaku Usaha	286.249.000	4	Pelaku Usaha	403.875.800	6	Pelaku Usaha	535.962.600	6	Pelaku Usaha	535.962.600	100	97.34	6	Pelaku Usaha	535.962.600	100	97.34												
		2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi				6	Pelaku Usaha	18.366.000	0	Pelaku Usaha	0	2	Pelaku Usaha	6.604.000	4	Pelaku Usaha	10.624.000	6	Pelaku Usaha	16.744.000	6	Pelaku Usaha	16.744.000	100	91.17	6	Pelaku Usaha	16.744.000	100	91.17												
		2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi				80	Orang	79.778.500	6	Orang	10.678.100	30	Orang	23.463.900	50	Orang	44.900.100	80	Orang	72.726.300	80	Orang	72.726.300	100	91.16	80	Orang	72.726.300	100	91.16												
		2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi				6	Pelaku Usaha	545.724.500	0	Pelaku Usaha	108.540.140	3	Pelaku Usaha	215.847.340	5	Pelaku Usaha	323.831.640	6	Pelaku Usaha	472.020.340	6	Pelaku Usaha	472.020.340	100	86.49	6	Pelaku Usaha	472.020.340	100	86.49												
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)				100	91.54																									
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan				ST	ST																									
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)				105.08	91.88																									
													Predikat Kinerja Kegiatan				ST	ST																									
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang aktif Dalam Investasinya				35	Persen	942.598.400	0	Persen	53.736.250	0	Persen	94.489.120	0	Persen	418.003.820	35	Persen	689.275.820	35	Persen	689.275.820	100	73.13	35	Persen	689.275.820	100	73.13												
		2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)				400	Perusahaan	942.598.400	0	Perusahaan	53.736.250	200	Perusahaan	94.489.120	320	Perusahaan	418.003.820	400	Perusahaan	689.275.820	400	Perusahaan	689.275.820	100	73.13	400	Perusahaan	689.275.820	100	73.13												

		2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda					1	kegiatan	82.187.700	0	kegiatan	23.076.900	0	kegiatan	42.600.450	0	kegiatan	58.455.450	1	kegiatan	70.379.250	1	kegiatan	70.379.250	100	85.63	1	kegiatan	70.379.250	100	85.63
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	------------	---	----------	------------	---	----------	------------	---	----------	------------	---	----------	------------	---	----------	------------	-----	-------	---	----------	------------	-----	-------

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tidak Ada

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab									
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K		Rp (Ribu)								
1	2	3	4					1	Pelaku Usaha	593.254.300	0	Pelaku Usaha	27.842.800	0	Pelaku Usaha	47.229.620	0	Pelaku Usaha	307.984.320	1	Pelaku Usaha	428.258.120	1	Pelaku Usaha	428.258.120	100	72.19	1	Pelaku Usaha	428.258.120	100	72.19			
		2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal					1	Pelaku Usaha	593.254.300	0	Pelaku Usaha	27.842.800	0	Pelaku Usaha	47.229.620	0	Pelaku Usaha	307.984.320	1	Pelaku Usaha	428.258.120	1	Pelaku Usaha	428.258.120	100	72.19	1	Pelaku Usaha	428.258.120	100	72.19			
		2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan					1	kegiatan	267.156.400	0	kegiatan	2.816.550	0	kegiatan	4.659.050	0	kegiatan	51.564.050	1	kegiatan	190.638.450	1	kegiatan	190.638.450	100	71.36	1	kegiatan	190.638.450	100	71.36			
												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												100	76.39										
												Predikat Kinerja Sub Kegiatan												ST	T										
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100	73.13										
												Predikat Kinerja Kegiatan												ST	S										
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi					100	Persen	643.671.000	0	Persen	33.124.010	0	Persen	87.217.110	100	Persen	252.813.310	100	Persen	603.799.110	100	Persen	603.799.110	100	93.81	100	Persen	603.799.110	100	93.81			
		2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan					100	Point	643.671.000	0	Point	33.124.010	0	Point	87.217.110	100	Point	252.813.310	100	Point	603.799.110	100	Point	603.799.110	100	93.81	100	Point	603.799.110	100	93.81			
		2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan					1	Dokumen	643.671.000	0	Dokumen	33.124.010	0	Dokumen	87.217.110	0	Dokumen	252.813.310	1	Dokumen	603.799.110	1	Dokumen	603.799.110	100	93.81	1	Dokumen	603.799.110	100	93.81			
												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												100	93.81										
												Predikat Kinerja Sub Kegiatan												ST	ST										
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100	93.81										
												Predikat Kinerja Kegiatan												ST	ST										
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										17.972.248.072			2.711.945.978			6.134.486.482			9.311.886.551			15.406.278.342			15.406.278.342						15.406.278.342				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .... )																							101.69	87.73											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																							ST	T											

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tidak Ada

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Tidak Ada

**Tabel T- C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Unit Organisasi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ta 202
				Tahun 2020 (n - 2)	Tahun 2021 (n - 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n + 1)	Tahun 2020 (n - 2)	Tahun 2021 (n - 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>											
1	PERDA mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi							-Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang tentang Fasilitasi Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan '- Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Investor '-Peraturan daerah Kabupaten Tabalong nomor 4 tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong				
2	Syandar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal							Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/Insentif				

3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal							1 Laporan Laporan Evaluasi Insentif/Kemudahan Berusaha				
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting							Seminar Bisnis (7 Kali) '- Forum Investasi (1 Kali) '- One on one Meeting Investor dan UMKM (1 Kali)				
5	Kegiatan pameran penanaman modal							- Pameran INDOKRAF EXPO 2022 '- Pameran Promosi Investasi 'Pekan Promosi dan Investasi Daerah 2022 '- Pameran Yogya Craft Indo 2022 '- MTQ Nasional Kalsel Expo (4 Kali)				
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal							- Misi Perdagangan dengan Provinsi Jawa Timur'- Misi Perdagangan dengan Kalimantan Timur'- Misi Perdagangan dengan Mesir(3 Kali)				
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal							ü Secara tatap muka 857 kali ü Secara online 74 kali ü Secara chat box 73 kali				
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal							NIB: 5.389 Perizinan: 913 Izin				
9	Laporan realisasi penanaman modal							Tersedianya Pers Rilis Investasi tahun 2022 <b>Total : Rp15.29T</b> (1 Laporan)				
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota							Terlaksananya Bimtek PM kepada Aparatur dan PM di Provinsi Kalimantan Selatan (8 Kali)				

	1 Pengawasan Penanaman Modal 1 PMA dan PMDN							Terlaksananya Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (37 Perusahaan)				
	1 Tersedianya data dan informasi dan non perizinan provinsi 2							Tersedianya pada Website dan SIMAPAN (2 Sistem)				
<b>2.</b>	<b>Indikator Kinerja PD</b>											
	1 Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)			12.00 T	10.83 T	11.65 T	12.55 T	7.75 T		11.65 T	12.55 T	13
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....			B (85)	B (85)	A (88.25)	A (88.50)	A (88.35)		A (88.25)	A (88.50)	A (88.50)

**Tabel T- C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan**

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
-1					-2	-3	4	5	-5	-6	-7	-8		-9	-10	-11	-12	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					28.460.428.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					35.172.259.872		
5	1	1	1.0	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.692.928.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.031.513.600		
5	1	1	1.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	646.464.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	775.756.800		

5	1	1	1.0 1	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	3 Laporan	646.464.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	3 Laporan	775.756.800	
				8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah		200.000.000						240.000.000	
				10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan				200.000.000						240.000.000	
5	1	1	1.0 2		Administrasi Keuangan					14.427.976.560	Administrasi Keuangan					19.173.571.872	
5	1	1	1.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang x 12 Bulan	13.821.734.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang x 12 Bulan	18.446.081.472	
5	1	1	1.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	468.104.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	561.724.800	
5	1	1	1.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	138.138.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	165.765.600	
5	1	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.094.232.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.313.078.400	
5	1	1	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan	20 orang	289.744.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan	20 orang	347.692.800	

						Selatan	berdasarkan Tugas dan Fungsi	fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				Selatan	berdasarkan Tugas dan Fungsi	fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
5	1	1	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	204 Orang	289.744.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	204 Orang		347.692.800	
5	1	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	289.744.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang		347.692.800	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	80 Stel	225.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas	80 Stel		270.000.000	
					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	80 Stel	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	80 Stel		0	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	80 Stel	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	80 Stel		0	
5	1	1	1.03		Administrasi Umum					3.986.864.000	Administrasi Umum						4.784.236.800	
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	253.344.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			304.012.800	

5	1	1	1.0 2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	271.544.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		325.852.800	
5	1	1	1.0 2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	790.244.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		948.292.800	
5	1	1	1.0 2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah peket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	244.244.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah peket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		293.092.800	
5	1	1	1.0 2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan	Dokumen	107.744.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan		129.292.800	
5	1	1	1.0 2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.319.744.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.783.692.800	
5	1	1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.602.488.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.992.278.400	
5	1	1	1.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	750.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	969.292.800	
5	1	1	1.0 7	5	Pengadaan Mebel	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	380.744.000	Pengadaan Mebel	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	456.892.800	

5	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	471.744.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	566.092.800	
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.098.732.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.718.478.400	
5	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	244.244.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	293.092.800	
5	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1.352.624.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1.623.148.800	
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1.501.864.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1.802.236.800	
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.432.208.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.159.102.400	
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	792.064.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	950.476.800	

5	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	950.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	380.452.800	
5	1	1	1.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	690.144.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	828.172.800	
5	1	1	1.09		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan wakil Daerah					125.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.440.102.400	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Steel	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	150.000.000	
5	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.620.876.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.145.051.200	
5	1	8	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					2.620.876.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					3.145.051.200	
5	1	8	1	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi					1.294.388.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi					1.553.265.600	



							Provinsi											
5	18	1	1.01	2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha provinsi	1 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha provinsi	1 Dokumen	240.000.000		
5	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3.011.008.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						3.613.209.600	
5	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					3.011.008.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						3.613.209.600	
5	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	1.505.504.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	1.806.604.800		
5	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	1.505.504.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	1.806.604.800		
5	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					3.765.744.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						4.518.892.800	
5	18	4	2	2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewena					3.765.744.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenan						4.518.892.800	

					ngan Daerah Provinsi					gan Daerah Provinsi						
5	18	4	2	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi	Pelaku usaha	1.365.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinanya yang dilayani 145 Jenis Izin Persentase Pemenuhan Pelayanan (dokumen permohonan) Perizinan dan Nonperizinan yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	Pelaku usaha	1.638.000.000
5	18	4	2	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen Perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	6 kegiatan pelaku usaha	1.365.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen Perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinanya yang dilayani 145 Jenis Izin Persentase Pemenuhan Pelayanan (dokumen permohonan) Perizinan dan Nonperizinan yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	6 kegiatan pelaku usaha	1.638.000.000
5	18	4	2	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan	Orang	200.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan	Orang	240.000.000

							dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi			Non Perizinan		dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi			
5	18	4	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	kegiatan Usaha	835.744.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	kegiatan Usaha	1.002.892.800	
5	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL						PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL						
5	18	5	1	2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.560.832.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.872.998.400	
5	18	5	1.01	1	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kegiatan usaha	562.744.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kegiatan usaha	675.292.800	
5	18	5	1.01	2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemabinaan pelaksanaan	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan	Pelaku usaha	471.744.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemabinaan pelaksanaan	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan	Pelaku usaha	566.092.800	

					dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	penanaman modal		Modal		penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	penanaman modal			
5	18	5	1.01	3	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	kegiatan usaha	526.344.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	kegiatan usaha	631.612.800
5	18	6			PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					1.089.944.000	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					1.307.932.800
5	18	6	1	1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					1.089.944.000	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					1.307.932.800
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan	1 Dokumen	1.089.944.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan	1 Dokumen	1.307.932.800



**Tabel T- C.32**

**USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Sub Unit Organisasi :**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	3 Laporan	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral daerah	1 Dokumen	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang x 12 Bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	204 Orang	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	80 Stel	
<b>Administrasi Umum</b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	
Pengadaan Mebel	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Daerah					
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	<b>Tersedianya Pakaian Dinas</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas</b>	<b>44 Stel</b>	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	
Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di Daerah	4 kegiatan usaha	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 Dokumen	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha provinsi	1 Dokumen	
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersusunnya Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					

Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani 145 Jenis Izin Persentase Pemenuhan Pelayanan (dokumen permohonan) Perizinan dan Nonperizinan yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	Pelaku usaha	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen Perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani 145 Jenis Izin Persentase Pemenuhan Pelayanan (dokumen permohonan) Perizinan dan Nonperizinan yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	6 kegiatan pelaku usaha	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	Orang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah Provinsi bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	kegiatan Usaha	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</b>					
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>					
penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kegiatan usaha	
Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku usaha	

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	kegiatan usaha	
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	



2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	8	1	1	7		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	646.464.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	775.756.800,00
2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
	8	1	1	8		-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Data	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	240.000.000,00
2	1	0	1.0	001	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
	8	1	1	0		-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	240.000.000,00
2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14.227.976.560					19.173.571.872	
	8	1	2									,00					,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	8	1	2	1														

					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	44 Orang/Bulan	-	13.621.734.560,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	18.446.081.472,00	
2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	468.104.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	561.724.800,00	
2	18	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	138.138.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	165.765.600,00	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.094.232.000,00					1.313.078.400,00
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												
					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	225.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	270.000.000,00	
2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

	8	1	5	9															
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	289.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	347.692.800,00	
2	18	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	289.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	347.692.800,00	
2	18	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	23 Orang	-	289.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	347.692.800,00	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.986.864.000,00						4.784.236.800,00	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	253.344.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	304.012.800,00
2	1 8	0 1	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	271.544.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	325.852.800,00
2	1 8	0 1	1.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	790.244.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	948.292.800,00
2	1 8	0 1	1.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	244.244.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	293.092.800,00
2	1 8	0 1	1.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												

					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	107.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	129.292.800,00			
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.319.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.783.692.800,00			
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.602.488.000,00							1.992.278.400,00	
2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	969.292.800,00			
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel															
					-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	380.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	456.892.800,00			
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

					-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	471.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	566.092.800,00
2	18	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.098.732.000,00					3.718.478.400,00
2	18	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	244.244.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	293.092.800,00
2	18	01	1.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.352.624.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.623.148.800,00
2	18	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.501.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.802.236.800,00
2	18	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.432.208.000,00					3.401.798.400,00
2	1	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas											

	8	1	9	2	Operasional atau Lapangan												
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	27 Unit	-	792.064.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	950.476.800,00
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1.623.148.800,00
2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	690.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	828.172.800,00
2	18	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							125.000.000,00					150.000.000,00
2	18	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												

					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	125.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	150.000.000,00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							2.620.876.000,00						3.145.051.200,00
2	18	02	1.0		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							1.294.388.000,00						1.553.265.600,00
2	18	02	1.0	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
					-	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	972.244.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1.166.692.800,00	
2	18	02	1.0	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi													
					-	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	322.144.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	386.572.800,00	
2	18	02	1.0		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							1.326.488.000,00						1.591.785.600,00

2	1	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi												
	8	2	2	1		-	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	675.892.800,00
2	1	0	1.0	000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)												
	8	2	2	3		-	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Daerah	-	563.244.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	675.892.800,00
2	1	0	1.0	000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi												
	8	2	2	5		-	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	563.244.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	240.000.000,00
2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							3.011.008.000,00				3.613.209.600,00	
2	1	0	1.0		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							3.011.008.000,00				3.613.209.600,00	
2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi												
	8	3	1	2													

					-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.505.504.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1.806.604.800,00
2	183	0	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi												
					-	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.505.504.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.806.604.800,00
2	184	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							3.765.744.000,00					4.528.892.800,00
2	184	0	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							3.765.744.000,00					4.528.892.800,00
2	184	0	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah												

					-	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	835.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.002.892.800,00
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko												
					-	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Pelaku Usaha	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	250.000.000,00
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												

					-	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Pelaku Usaha	-	1.365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	1.638.000.000,00
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko												
					-	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kegiatan Usaha	-	1.365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	1.638.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							1.560.832.000,00					1.872.998.400,00
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							1.560.832.000,00					1.872.998.400,00
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal												

					-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kegiatan usaha	-	562.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan usaha	675.292.800,00
2	185	01	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												
					-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kegiatan usaha	-	471.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan usaha	566.092.800,00
2	185	01	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												

					-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Pelaku Usaha	-	526.344.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	631.612.800,00	
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						1.089.944.000,00					1.307.932.800,00
2	1	0	1.0			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						1.089.944.000,00					1.307.932.800,00
2	1	0	1.0	000		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
					-	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.089.944.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1.307.932.800,00	
<b>TOTAL</b>												<b>40.308.832.560,00</b>					<b>51.033.040.672,00</b>



